

IMPLEMENTASI PELAYANAN PEMBUATAN KARTU AK-1 MELALUI WEB YOKERJO DI DINAS KOPERASI UKM TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN JEPARA

Bima Adyaksa

NPP. 30.0653

Asdaf Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah

Prodi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Email: 30.0653@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi : Piet Hein Pusung, S.IP, M.Si.

ABSTRACK

Problem Statement/Background (GAP): The AK-1 card is an official identity card issued by the Cooperatives, Small and Medium Enterprises (SMEs), Manpower, and Transmigration Office of Jepara Regency to migrant workers working at home and abroad. As an effort to increase efficiency and convenience in AK-1 card making services. **Purpose:** This study aims to analyze and document the implementation of AK-1 card making services, explain the inhibiting factors and describe the efforts made by the Cooperatives, SMEs, Manpower, and Transmigration Office of Jepara Regency. **Methods:** The methods used include data collection through documentation studies, direct observation, and interviews with related parties. **Results:** The results show that the implementation of AK-1 card making services through Yokerjo Web at the Cooperatives, SMEs, Manpower, and Transmigration Office of Jepara Regency has brought various benefits. First, services become more efficient because the application and verification process is carried out online. This reduces the time required to take care of conventional paperwork. Secondly, accessibility is increasing as migrant workers can access the Yokerjo Web platform anytime and anywhere with an internet connection. Third, the use of information technology helps in monitoring and data management of migrant workers in a more integrated manner. The inhibiting factor in this study is the limitations of migrants in the use of technology, so efforts are needed to provide education and training related to the use of Yokerjo Web. In addition, the protection of personal data of migrant workers must be considered properly to maintain the confidentiality and security of information. **Conclusion:** the implementation of AK-1 cards making services through Yokerjo Web at the Cooperatives, SMEs, Manpower, and Transmigration Office of Jepara Regency provides significant benefits in terms of efficiency and accessibility. Nonetheless, challenges related to technological literacy and data protection need to be addressed to ensure the long-term success of these systems. It is hoped that this research can provide guidance for similar institutions in implementing effective digital services for migrant workers.

Keywords: Implementation, AK-1 Card, Yokerjo Web

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kartu AK-1 merupakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Jepara kepada pekerja migran yang bekerja di dalam maupun di luar negeri. Sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam pelayanan pembuatan kartu AK-1. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan

mendokumentasikan implementasi pelayanan pembuatan kartu AK-1, menjelaskan factor penghambat serta mendeskripsikan upaya yang dilakukan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Jepara. **Metode:** Metode yang digunakan meliputi pengumpulan data melalui studi dokumentasi, observasi langsung, serta wawancara dengan pihak terkait. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelayanan pembuatan kartu AK-1 melalui Web Yokerjo di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Jepara telah membawa berbagai manfaat. Pertama, pelayanan menjadi lebih efisien karena proses pengajuan dan verifikasi dilakukan secara online. Hal ini mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengurus dokumen secara konvensional. Kedua, aksesibilitas meningkat karena pekerja migran dapat mengakses platform Web Yokerjo kapan saja dan di mana saja dengan koneksi internet. Ketiga, penggunaan teknologi informasi membantu dalam pemantauan dan manajemen data pekerja migran secara lebih terintegrasi. Faktor penghambat dalam penelitian ini adalah keterbatasan migran dalam penggunaan teknologi, sehingga diperlukan upaya untuk memberikan edukasi dan pelatihan terkait penggunaan Web Yokerjo. Selain itu, perlindungan data pribadi pekerja migran harus diperhatikan dengan baik untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi. **Kesimpulan:** implementasi pelayanan pembuatan kartu AK-1 melalui Web Yokerjo di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Jepara memberikan manfaat signifikan dalam hal efisiensi dan aksesibilitas. Meskipun demikian, tantangan terkait dengan literasi teknologi dan perlindungan data perlu diatasi untuk memastikan keberhasilan jangka panjang dari sistem ini. Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan panduan bagi institusi serupa dalam mengimplementasikan pelayanan digital yang efektif untuk pekerja migran.

Kata Kunci : Implementasi, Kartu AK-1, Web Yokerjo

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat terus mencari layanan pemerintah yang berkualitas tinggi, baik yang berkaitan dengan administrasi maupun layanan. Mengingat beragamnya tuntutan pelayanan publik sebagai tanda ketidakpuasan masyarakat yang sering kita alami sehari-hari, pelayanan publik yang menjadi pokok kajian Ilmu Administrasi Publik di Indonesia tetap menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian dan jawaban yang mendalam.

Pelayanan pemerintah kepada masyarakat selalu berubah. Baik dari segi paradigma maupun mode pelayanan, yang seringkali berubah seiring dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat maupun perubahan dalam diri pemerintah itu sendiri. Namun, hasilnya masih belum cukup untuk memuaskan masyarakat luas. Dengan meningkatnya intensitas persaingan, suatu organisasi harus senantiasa memperhatikan aspirasi dan keinginan masyarakat dan bekerja sama untuk memenuhi kepuasan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang lebih memuaskan daripada pesaing. Kondisi dinamis di mana produk, layanan, orang, dan lingkungan memenuhi atau melampaui harapan dicirikan sebagai kualitas.

Gagasan kualitas pelayanan dapat dilihat sebagai upaya untuk memenuhi keinginan dan tujuan masyarakat, serta ketepatan penyampaiannya dalam memenuhi harapan masyarakat, tenaga kerja, dan kualitas tenaga kerja individu terkait. Kualitas mendorong warga untuk membangun hubungan yang erat dengan organisasi atau badan pemerintah. ditingkatkan oleh lembaga nonprofit atau pemerintah yang memprioritaskan pengalaman komunitas yang positif sambil membatasi pengalaman komunitas yang negatif dalam lingkungan ini, masyarakat umum lebih berani mengkritik kualitas layanan yang mereka dapatkan. Akibatnya, konten administratif sangat penting dalam mengawasi dan mengatur semua operasi organisasi layanan untuk memenuhi tujuannya. Menurut Undang-undang Nomor 25

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap warga negara dan penduduk wajib dilayani. Pelayanan publik pemerintah merupakan wujud dari fungsi aparatur negara baik sebagai abdi negara maupun abdi negara, namun salah satu permasalahan yang sering muncul dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat adalah dalam bidang pelayanan publik itu sendiri, khususnya dari segi kualitas. atau jumlah layanan yang diberikan kepada publik oleh pejabat pemerintah

Dalam rangka memberikan pelayanan yang bermutu, pemerintah membuat keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik, Namun, strategi ini tidak akan dapat dilaksanakan secara optimal jika perangkat pemerintah tidak berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Aparatur Negara dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan harus ditingkatkan dengan mengoptimalkan dan konsisten kinerja aparatur pemerintah, serta meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan sesuai dengan fungsinya. Salah satu tugas utama yang harus dilaksanakan pemerintah baik di tingkat federal maupun regional adalah penyediaan layanan publik. Mengingat peran utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka pemerintah harus terus meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satunya adalah layanan pembuatan kartu kuning atau AK-1.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan mengangkat judul **“Implementasi Pelayanan Pembuatan Kartu AK-1 atau Surat Pencari Kerja melalui Web YOKERJO Di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara”**.

1.2 Kesenjangan Masalah

Kabupaten Jepara untuk saat ini masih banyak kekurangan dalam pelayanan publik pejabat pemerintah, seperti metode pelayanan yang sering kali tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi persoalan dalam melaksanakan pengelolaan pemerintahan. dan masih banyaknya keluhan dari masyarakat yang menjadi alasan belum tersedianya pelayanan yang diharapkan masyarakat, salah satunya dalam pelayanan pembuatan kartu kuning atau AK-1 secara daring yang baru dilaksanakan ketika pandemi covid-19 pada tahun 2020 pembuatan kartu AK-1 dilaksanakan secara daring pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara.

Keberadaan covid-19 ini mengganggu pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara langsung atau tatap muka sehingga pelayanan terhambat dan kurang maksimal karena halnya bisa dilakukan secara Online.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks Pelayanan Kartu Tanda Pencari Kerja (kartu AK-1) sebagai berikut. Pertama, Strategi Dinas Tenaga Kerja Dalam Meningkatkan Pelayanan Kartu Tanda Pencari Kerja (Kartu AK-1) di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat (Zelita Valda Vania, 2021) dengan hasil Strategi yang dilakukan adalah Strategi SO yaitu mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan berbagai peluang seperti kerja sama di bidang inovasi pelayanan untuk meningkatkan pelayanan kartu (AK-1). Kedua, Manajemen Pelayanan Publik Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dalam Pengelolaan Program Kartu Pra-Kerja (Nurul Permata Dewi, 2021) dengan hasil Program Kartu Pra-Kerja dilakukan dengan pelayanan konsultasi pendaftaran dan pelatihan Kartu Pra-Kerja. Ketiga, Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu Kuning (AIK-1) Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung (Endalng Junaedi, 2017) dengan hasil penelitian ini ditemukan untuk

pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah kepada masyarakat sudah cukup balik, terbukti makin meningkatnya pemahaman mengenali pembuatan kartu kuning (AIK-1).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, fokus dan lokus penelitian yang berbeda di mana peneliti akan melakukan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara dengan fokus penelitian yaitu pada implementasi pelayanan pembuatan kartu AK-1 Melalui Web YOKERJO.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi pelayanan pembuatan kartu AK-1 melalui web YOKERJO yang dilaksanakan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Jepara, apa saja yang menjadi faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara dalam implementasi pelayanan pembuatan kartu AK-1 melalui web YOKERJO, apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi pelayanan pembuatan kartu AK-1 melalui web YOKERJO oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu sebagai pendekatan atau penelusuran yang berguna untuk mengeksplorasi dan juga memahami gejala sentral.(cresswell,2010). Penelitian ini menggunakan teori Implementasi oleh George C. Edward III dalam Agustino (2020:154) yang terdapat 4 Dimensi yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Organisasi.

Informan pada penelitian ini terdapat 9 informan yang terdiri dari 5 Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara dan orang masyarakat . Menurut Sugiyono (2013:224) teknik pengumpulan data yaitu suatu langkah paling strategis dalam penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini penulis dalam mengumpulkan data menggunakan Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Penulis menggunakan Teknik analisis model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013:195) terdapat tiga tahapan dalam analisis kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Pelayanan Pembuatan Melalui Web Yokerjo

Implementasi yang digunakan penulis yaitu teori dari George C. Edward III dalam Leo Agustino (2020:154) dapat diketahui bahwa faktor kesuksesan sebuah implementasi suatu program dipengaruhi oleh empat faktor yang ada, yaitu:

a. Komunikasi

George C. Edwards II membagi tiga hal penting yang menjadi indikator keberhasilan suatu komunikasi, yaitu:

1. Transmisi

indikator transmisi telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara dengan mensosialisasikan lewat media baik cetak maupun lewat media sosial mengenai Pembuatan kartu pencari kerja secara online melalui web Yokerjo yang dilakukan sosialisasi diberbagai lokasi tujuannya yaitu untuk masyarakat agar tidak perlu ke kantor

lagi untuk membuat kartu kuning ini dan menghindari kerumunan saat di dinas. Selain itu tujuannya adalah menjalin hubungan yang baik dan harmonis antara pemerintah dan masyarakat juga membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam pelayanan pembuatan kartu AK-1 melalui web Yokerjo.

2. Kejelasan

Kejelasan informasi saat berkomunikasi memiliki peran yang penting karena suatu informasi yang diterima akan menentukan tindakan yang kedepannya akan dilakukan untuk menghindari kebingungan dan juga multitafsir yang dapat menyebabkan penyimpangan tujuan. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara memberikan informasi mengenai pembuatan kartu AK-1 secara jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara melaksanakan indikator kejelasan dengan baik karena dijelaskan bahwa penyampaian informasi yang diberikan kepada masyarakat sudah dirasa cukup dan sesuai dengan SOP nya.

3. Konsistensi

Konsistensi berarti suatu ketetapan atau kemantapan yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan suatu kebijakan. Konsistensi dibutuhkan dalam menjalankan perintah dalam bekerja karena dengan adanya konsistensi ini menunjukkan suatu ke runtutan dalam berpola pikir, berlogika serta bagaimana bersikap akan suatu masalah yang dihadapi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara selalu konsisten untuk berupaya memberikan pelayanan yang prima dengan melakukan evaluasi secara berkala agar permasalahan yang ada segera teratasi dan mencegah permasalahan lainnya muncul.

b. Sumber Daya

Dalam sumber daya terdapat 4 indikator yaitu staf, wewenang, informasi dan fasilitas yang akan penulis jelaskan sebagai berikut.

1. Staf

para staf memberikan pelayanan yang maksimal dan keseluruhan staf sudah kompeten dan memadai. Selain itu, para pegawai tidak menerima dan meminta segala jenis pungutan liar atau insentif untuk mendapatkan proses pelayanan tanpa antrian dan cepat, hal ini sesuai dengan anjuran dari pemerintah untuk pelayanan yang bebas biaya. Terutama untuk pelayanan Online melalui web Yokerjo ini dijamin tanpa biaya atau gratis tanpa tambahan apapun.

2. Wewenang

wewenang sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan ketentuan seperti pada saat terdapat permasalahan penting yang sekiranya bersifat mendesak staf dianjurkan untuk bertanya kepada pimpinan yang berwenang terlebih dahulu, untuk kemudian pimpinan yang berwenang akan memberikan solusi atas permasalahan yang ada. Koordinasi ini terjalin dengan baik antara pimpinan paling atas hingga pelaksana perintah

3. Informasi

usaha agar pembuatan AK-1 melalui web Yokerjo memiliki banyak peminat seperti melakukan sosialisasi yang dilakukan secara online maupun secara langsung. Sosialisasi secara online yaitu seperti mempromosikan lewat media sosial seperti pada facebook, Instagram, twitter maupun dengan melakukan forum diskusi. Untuk

sosialisasi yang dilakukan secara langsung seperti di SMA dan SMK serta media cetak seperti melalui baliho, poster, pamflet maupun kalender. Selain itu kami juga meminta bantuan lewat ketua RT/RW untuk membantu menjelaskan mengenai web Yokerjo ini.

4. Fasilitas

sarana dan prasarana yang ada dan digunakan dalam pelayanan baik secara langsung maupun yang melalui web Yokerjo sudah mencukupi. Namun, masih diperlukan lagi pembaruan sarana dan prasarana untuk menunjang kualitas pelayanan. Sejauh ini pengadaan barang tersebut masih dianggarkan dan perlu waktu untuk merealisasikannya.

c. Disposisi

Dalam disposisi terdapat 2 indikator yaitu pengangkatan birokrat, dan insentif yang akan penulis jelaskan sebagai berikut.

1. Pengangkatan Birokrat

Saat Kabupaten Jepara menjadi zona merah semua pelayanan hanya dilakukan secara online lewat web Yokerjo sehingga butuh implementor yang paham mengenai teknologi, dan kami memiliki admin yang memegang web tersebut adalah orang yang paham dan memiliki kemampuan dalam bidang teknologi sehingga mampu mengerjakan tugasnya dengan baik. Selain itu pada saat pemilihan pegawai juga melalui tes komputer dan pengangkatan pegawai sesuai dengan SK penempatan. pengangkatan birokrat dilaksanakan dengan baik karena pengangkatan pegawai tidak dipilih secara sembarangan. Pegawai diseleksi berdasarkan kemampuan dan keahlian sesuai bidang yang dibutuhkan sehingga bisa dapat dipertanggungjawabkan.

2. Insentif

Insentif di sini bisa berupa penghargaan bagi pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara yang berprestasi. Untuk pegawai yang bisa menyelesaikan tugasnya bahkan melewati target kami memberikan reward berupa pemajangan foto di ruang front Office dan juga pemberian kain troso. Begitu juga sebaliknya, jika ada pegawai yang tidak sesuai dengan tupoksi maka kami juga akan memberikan sanksi, namun selama ini belum pernah ada pegawai yang melanggar aturan yang ada. pegawai yang mendapat reward dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu salah satu Admin Web Yokerjo, Bapak Fitra Rizky Yosa, S.Psi yang menjadi pegawai panutan karena menyelesaikan tugasnya dengan baik dan ketekunan dalam bekerja karena beliau memiliki tugas yang lebih seperti membuat laporan harian mengenai pelayanan yang dilakukan di hari itu. Namun, Ibu Amrina Rosyida.S.Psi.,M.H mengatakan kalau insentif hanya berasal dari anggaran dinas kami tidak pernah menerima uang tambahan dari mana pun termasuk dari masyarakat sendiri

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi mempunyai dua karakter yang dapat memacu ke arah yang lebih baik yaitu Standart Operasional Prosedur dan Fragmentasi.

1. Standart Oprasional Prosedur (SOP)

SOP pelayanan administrasi melalui web Yokerjo belum dibuat secara khusus. Namun, hal itu tidak menjadi hambatan karena berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis pelayanan melalui web Yokerjo ini berjalan lancar dan membantu meningkatkan pelayanan yang ada, masyarakat juga mulai menyesuaikan diri dengan pelayanan online ini karena kemarin tahun 2020 kondisi covid-19 ini terutama saat zona merah di Kabupaten Jepara.

2. Fragmentasi

Fragmentasi ini berarti seperti melihat apakah ada tumpang tindih pekerjaan yang sama dalam beberapa bidang atau tidak. Penyebaran tanggung jawab pada suatu kebijakan membutuhkan suatu koordinasi dengan pihak yang terkait dan setiap personal yang terlibat. Koordinasi harus tetap dilaksanakan demi berjalannya suatu kebijakan. Disini Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara telah melakukan Kerjasama dengan pemerintah desa lewat admin kecamatan untuk memberikan dan informasi dan membantu melayani pelayanan kependudukan melalui web Yokerjo.

3.2 Faktor- Faktor Penghambat Implementasi Pembuatan AK-1 Melalui web Yokerjo

Implementasi pembuatan kartu AK-1 melalui web yokerjo terdapat beberapa penghambat yang perlu dicari solusinya supaya dapat diselesaikan untuk dilakukan pengembangan dan juga perbaikan supaya dapat berjalan secara optimal. Hambatan yang dihadapi dalam implementasi pembuatan AK-1 melalui web yokerjo yaitu Sumber Daya Manusia, Terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang kompeten secara detail terkait sistem operasi digital kependudukan dan pencatatan sipil.

1. Belum semua masyarakat Kabupaten Jepara yang mengetahui mengenai pelayanan online melalui web Yokerjo.
2. Belum adanya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membaca dan mendengarkan
3. Masyarakat di Kabupaten Jepara belum seluruhnya paham dengan teknologi
4. Kesalahan pada sistem atau server down
5. Waktu pembuatan tidak tepat waktu

3.3 Upaya mengatasi hambatan yang ada dalam Pembuatan Kartu AK-1 Berbasis web Yokerjo di Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara

Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ada dalam pembuatan kartu AK-1 melalui web Yokerjo di Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara yaitu:

1. Melakukan sosialisasi dan juga pemahaman secara berkala kepada masyarakat mengenai pembuatan kartu AK-1 melalui web Yokerjo yang memudahkan masyarakat.
2. Sosialisasi dilakukan secara intensif kepada masyarakat dengan mendatangi desa-desa untuk mensosialisasikan kartu AK-1 dan pentingnya membaca serta mencari tau informasi terkait kartu AK-1. Sosialisasi ini juga harusnya tidak hanya lewat media sosial tapi juga koran atau majalah yang biasanya dibaca oleh masyarakat yang kurang tau teknologi atau gptek.
3. Memberikan pemahaman mengenai pemanfaatan teknologi seperti melakukan pelayanan secara online dan memberikan bantuan di desa terutama bagi masyarakat yang kurang melek teknologi.
4. Melakukan perbaikan jaringan dan sistem yang ada pada web Yokerjo secara terus menerus, tepat dan cepat dengan cara meningkatkan dan memperbarui kualitas sistem dan sarana prasarana media pelayanan.
5. Melaksanakan manajemen waktu sehingga keterlambatan pembuatan AK-1 bisa diselesaikan segera dan sesuai dengan ketentuan dan SOP nya.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi Pembuatan Kartu AK-1 Berbasis web Yokerjo di Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara terlaksana dengan baik namun masih ditemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Hal ini sama dengan yang dialami Zelita Valda Vania (2021) dalam menganalisis Strategi Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dalam Meningkatkan Pelayanan Kartu AK-1 yang ditemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian tersebut menghasilkan bagai mana strategi Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dalam menerapkan Strategi SO dengan tujuan meningkatkan pembuatan kartu AK-1.

Pada saat peneliti melaksanakan penelitian, peneliti melaksanakan observasi mengenai tingkat pemahaman masyarakat terhadap pengetahuan masyarakat dalam pemanfaatan media sosial dalam mencari informasi terkait kartu AK-1 pada Kabupaten Jepara, penulis menemukan masyarakat banyak yang gptek dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Peneliti menemukan bawasannya masyarakat kabupaten jepara belum memperoleh pelayanan secara maksimal dalam pelayanan pembuatan kartu AK-1 dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat. Hal tersebut sama halnya dialami oleh Nurul Permata Dewi (2021) pada saat penelitian yang membahas mengenai pengelolaan Program Kartu Pra-Kerja yang menunjukkan bahwa masyarakat yang belum merasakan dari pelayanan yang diberikan.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil dari wawancara, dokumentasi dan observasi yang dilakukan oleh penulis di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara mengenai pelayanan pembuatan melalui web Yokerjo dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Implementasi pelayanan pembuatan AK-1 melalui web Yokerjo di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara mengenai pelayanan pembuatan melalui web Yokerjo dianalisis menggunakan teori dari George C. Edward III dinilai sudah terlaksana dengan baik namun belum cukup optimal karena masih ditemukan hambatan.
2. Faktor penghambat implementasi pelayanan pembuatan AK-1 melalui web Yokerjo yaitu:
 - a. Belum semua masyarakat mengetahui mengenai web Yokerjo.
 - b. Masyarakat belum sadar mengenai pentingnya membaca dan mencari tau informasi.
 - c. Belum seluruh masyarakat paham mengenai teknologi.
 - d. Kesalahan sistem atau server down.
 - e. Waktu pembuatan tidak tepat waktu
3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara mengenai pelayanan pembuatan melalui web Yokerjo dalam mengatasi hambatan yang ada pada implementasi pelayanan pembuatan melalui web Yokerjo yaitu:
 - a. Melakukan sosialisasi melalui semua media baik media sosial maupun konvensional mengenai web Yokerjo.
 - b. Sosialisasi mengenai pentingnya membaca dan mencari informasi serta tertib administrasi pelayanan kepada masyarakat.
 - c. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai teknologi untuk kepengurusan administrasi pelayanan secara online.
 - d. Memperbaiki sistem jaringan pada web Yokerjo.

- e. Melaksanakan penataan dan manajemen waktu sehingga penyelesaian pembuatan AK-1 melalui web Yokerjo dapat lancar.
- f. Melakukan rapat evaluasi di akhir bulan untuk memecahkan permasalahan yang di hadapi masyarakat mengenai pelayanan terutama pembuatan AK-1 yang melalui web Yokerjo.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini keterbatasan utama yakni waktu. Keterbatasan waktu penulis maksimalkan dalam proses Penelitian ini dalam hal Observasi, Dokumentasi dan Wawancara untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan penulis

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian yang penulis laksanakan, oleh karena itu untuk melengkapi kekurangan dalam penelitian ini penulis berharap ada yang meneruskan penelitian ini agar dapat memaksimalkan hasil dari penelitian ini.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian dan membagi pengetahuan kepada peneliti yang tentunya peneliti dapat terapkan pada di dunia kerja nanti. Serta masyarakat yang berperan memberikan informasi pada penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Creswell, John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed, Third Edition*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*: Bandung: Alfabeta.
- Dewi, N. P. 2021. *Manajemen Pelayanan Publik Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Dalam Pengelolaan Program Kalrtu Pra-Kerja*. Skripsi, Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumaltera Utara.
- Junaedi, E. 2007. *Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu Kuning (AIK-1) Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung*. Skripsi, Jawa Barat: Universitas Pasundan Bandung.
- Vania, Z. (2021). *Strategi Dinas Tenaga Kerja Dalam Meningkatkan Pelayanan Kartu Tanda Pencari Kerja (Kartu Kuning AK-1) Di Kotal Bekasi Provinsi Jawa Barat, Volume 2, 1-12.*
- <https://yokerjo.jepalral.go.id/>
- <https://diskopukmnakertralns.jepalral.go.id/caltegori/loker/>
- <http://sukosono.jepalral.go.id/index.php/alrtikel/2021/2/11/pelalyalnaln-kalrtu-alk-1-sekalralng-bisal-dengaln-calral-online-lho-guys>